



**PERJANJIAN KINERJA  
PERWAKILAN BPKP  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**TAHUN 2020**

**Nomor : S-2059/PW12/6/2020  
Tanggal: 4 September 2020**





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Parantritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta – telepon : (0274) 385323; 445271  
Faksimile : (0274) 415984 – E-mail : yogya@bpkp.go.id

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Tulus Wahyana  
Jabatan : Kepala Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Muhammad Yusuf Ateh  
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 4 September 2020  
Pihak Pertama,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001

Slamet Tulus Wahyana  
NIP 19610523 198203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp	234.000.000
		1.2 Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Dioptimalisasi	Rp	468.000.000
		1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp	1.123.000.000
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara	Rp	54.249.000.000
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah KP yang diawasi	KP	7
		2.2 Jumlah KP yang tercapai sesuai target	KP	7
		2.3 Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	PSN	1
		2.4 Presentase Hambatan Pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	%	75
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	1
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	11
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	1
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	12
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	%	100
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	%	70
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	12
		5.2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Pemda	12
		5.3 Jumlah Pemda Provinsi dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	1
		5.4 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Pemda	2
		5.5 Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	%	1,11
		5.6 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	RS	1
		5.7 Persentase Jumlah desa yang Menyusun laporan	%	45,01
		5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
6	Meningkatnya Kualitas Layanan "Ketatausahaan" Unit Kerja	6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75
		6.2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	%	100
		6.3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	%	100
		6.4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	%	100
		6.5 Skor IKPA Unit Kerja	Skor	86
		6.6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	%	90
		6.7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP	Laporan	1
		6.8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Nilai	Baik
		6.9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	80
		6.10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Nilai	Level 3
		6.11 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	SKor	70
		6.12 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (Stakeholder)	Skor	70

Kegiatan:

1 Pengawasan Pembangunan	Rp	2.295.410.000,00
2 Dukungan Manajemen	Rp	30.321.812.000,00
Jumlah	Rp	32.617.222.000,00

Kepala BPKP

Muhammad Yusuh Ateh  
NIP

Jakarta, 4 September 2020  
Kepala Perwakilan

Stamet, Tulus Wahyana  
NIP